

# **PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) TAHUN 2018**



**PEMERINTAH KOTA BATU  
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
DAN TENAGA KERJA**

Balai Kota Among Tani Blok B Lantai 1  
Jl. Panglima Sudirman No 507 Kota Batu

## **KATA PENGANTAR**

Syukur Alhamdulillah kami sampaikan atas selesainya penyusunan “Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tahun 2018” yang diupayakan sedapat mungkin memenuhi kebutuhan pembangunan Kota Batu melalui Bidang penanaman modal, pelayanan perijinan dan Tenaga Kerja

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja suatu instansi pemerintah mutlak dilakukan untuk menjadi pedoman dalam bekerja guna tercapainya cita-cita pembangunan. Karena itu, Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tahun 2018 ini disusun untuk menjadi bagian dari upaya mewujudkan Tujuan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, diharapkan agar target yang telah direncanakan dapat terpenuhi di setiap tahun anggaran sehingga Tujuan tersebut dapat tercapai.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun dan semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan dokumen perencanaan ini. Semoga Allah SWT memberkahi usaha kita.

Batu, 6 Juli 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN  
MODAL PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU  
DAN TENAGA KERJA  
KOTA BATU**

**Dr. ENY RACHYUNINGSIH, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660517 199303 2 003

## DAFTAR ISI

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan PD untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan serta kebutuhan anggaran indikatif kegiatan. Penyusunan Renja merupakan salah satu rangkaian tahapan perencanaan pembangunan setelah tersusunnya RPJMD, RENSTRA PD dan Rancangan Awal RKPD. Dalam Penyusunan Renja PD dilakukan pengkajian program dan kegiatan yang tertuang dalam Rancangan Awal RKPD dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja pada tahun sebelumnya, pencapaian target RENSTRA PD, usulan dari masyarakat/pemangku kepentingan, serta analisis kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 terdapat 2 tahapan dalam melakukan perubahan Renja PD yaitu tahap penyusunan rancangan perubahan dan penyusunan rancangan akhir perubahan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Penyusunan Perubahan Renja mengacu pada rancangan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat

Daerah sampai dengan triwulan II tahun berjalan.

Dengan adanya perubahan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2018, maka berdampak pada perencanaan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dimana harus menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2018. Dokumen Perubahan Renja merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2018, Perubahan Renja disesuaikan agar dapat mendukung percepatan pencapaian target tujuan Perangkat Daerah.

Selanjutnya Perubahan Renja PD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) melalui penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P).

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tahun 2018 adalah :

- 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

- Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 7 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batu Tahun 2005-2025;
  - 8 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dan Lembaga Teknis Daerah Kota Batu;
  - 9 Peraturan Walikota Batu Nomor 75 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tahun 2018 adalah untuk menentukan arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi di urusan penanaman modal dan urusan ketenagakerjaan.

Tujuan penyusunan Perubahan Renja adalah untuk :

1. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.
2. Mengkaji Renja PD berdasarkan evaluasi kinerja triwulan II, evaluasi pencapaian target Renstra dan kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD
3. Menetapkan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
4. Sebagai acuan dalam penyusunan RKA-P Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tahun 2018.

### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Dokumen Rencana Kerja (Renja) 2018 disusun dengan mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika penulisan

#### BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

#### BAB II RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENJA

#### BAB IV PENUTUP

## **BAB II**

# **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**

### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II**

Laporan hasil kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja adalah program dan kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan triwulan II Tahun 2018.

Hasil kinerja pada triwulan II Tahun 2018 dilaksanakan berdasarkan penjadwalan program dan kegiatan. Walaupun ada beberapa program / kegiatan yang kurang sesuai dengan jadwal pelaksanaan, namun secara keseluruhan kinerja yang telah dilaksanakan sudah baik dan memenuhi target yang ditentukan. Berikut ini disajikan Tabel evaluasi pelaksanaan Renja 2018 sampai dengan triwulan II :



Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Triwulan II			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2018	
					Target Renja PD Tahun 2018	Realisasi Renja PD Th 2018	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	Program Pembinaan Lingkungan Sosial								
1	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	Jumlah peserta angkatan kerja yang mendapatkan pelatihan	225 orang	-	36 orang	36 orang	100	36 orang	-
2	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja								
1	Pembinaan dan Peningkatan Mutu Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPKS yang mendapatkan peningkatan kompetensi instruktur	173 orang	-	30 instruktur	-	-	-	-
3	Program Peningkatan Kesempatan Kerja								
1	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Jumlah informasi lowongan pekerjaan yang tersedia	1300 lowongan	-	300 lowongan	-	-	-	-
2	Penyiapan tenaga kerja siap pakai	Jumlah peserta yang mengikuti acara	2050 orang	-	250 orang	250 orang	100	250 orang	-

3	Perluasan Tenaga Kerja pada Sektor UMSI	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan manajemen	280 orang	-	80 orang	80 orang	100	80 orang	-
4	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan								
1	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah perselisihan yang difasilitasi penyelesaiannya	128 kasus	-	20 Kasus	-	-	-	-
2	Survei KHL dan Penetapan UMK	Jumlah survei yang dilakukan dalam menentukan nilai KHL, pemantauan UMK, pemberian THR bagi pekerja	12 laporan	-	12 laporan	7 laporan	58	7 laporan	-
3	Sosialisasi Penetapan UMK	Jumlah pelaku usaha yang memedomani pemberian UMK	550 peserta	-	100 peserta	-	-	-	-
5	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi								
1	Peningkatan Fasilitasi Terwujudnya Kerjasama Strategis Antara Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah	Jumlah peserta yang mengikuti fasilitasi kerjasama usaha	500 pelaku usaha	-	100 pelaku usaha	-	-	-	-
2	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah usaha yang dipantau dan diawasi pelaksanaan penanaman modal	288 perusahaa	-	108 perusahaan	45 perusahaan	41,6	45 perusahaan	-
3	Penyelenggaraan Pameran Investasi	Jumlah pameran investasi	12 pameran	-	1 pameran	-	-	-	-

4	Promosi Kerjasama Investasi Event Khusus	Jumlah pameran investasi	9 pameran	-	1 pameran	-	-	-	-
6	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi								
1	Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Di Bidang Investasi	Jumlah peserta yang mengikuti workshop LKPM online	300 pelaku usaha	-	100 pelaku usaha	50 pelaku usaha	50	50 pelaku usaha	-
	Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal Kepada Masyarakat Dunia Usaha	Jumlah peserta yang memahami kebijakan penanaman modal	2400 peserta	-	480 peserta	-	-	-	-
7	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi								
1	Penyusunan Database Perijinan	Jumlah bangunan yang diinventarisasi	60.000 bangunan	-	60.000 bangunan	-	-	-	-
8	Program Peningkatan Pelayanan Perijinan								
1	Peninjauan dan Evaluasi Kelayakan Perijinan	Jumlah permohonan izin yang ditinjau dan dievaluasi	18.800 izin	-	3500 izin	1450 izin	41,4	1450 izin	-
2	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Jumlah SPP dan SOP Perijinan	120 sop	-	74 sop	-	-	-	-
3	Penyediaan Informasi dan Kelengkapan Pendaftaran Perijinan	Jumlah perlengkapan pelayanan perizinan	34.500 lembar	-	11.500 lembar	-	-	-	-
4	Uji Publik dan Pembahasan Perubahan Perda IMB	Jumlah Perda yang direvisi	1 perda	-	1 perda	-	-	-	-
5	Peningkatan Profesionalisme SDM Pelayanan Perijinan	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	150 pegawai	-	30 Orang	-	-	-	-
9	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								

1	Pendidikan dan Pelatihan Formal Daya Aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan/diklat	60 pegawai	-	8 orang	-	-	-	-
10	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pelayanan Surat Menyurat yang terlaksana	250 paket pengiriman	-	50 paket pengiriman	10	20	10	-
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah honorarium yang disediakan selama periode 1 tahun	43 Honorarium	-	43 Honorarium	43 Honorarium	100	43 Honorarium	-
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis yang disediakan	56 jenis atk	-	43 jenis atk	35 jenis	81,3	35 jenis	-
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	14 Jenis	-	6 Jenis	6 Jenis	100	6 Jenis	-
5	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan dan Bahan Pembersih yang disediakan	4 bahan pembersih dan 9 peralatan kebersihan	-	4 bahan pembersih dan 9 peralatan kebersihan	4 bahan pembersih dan 9 peralatan kebersihan	100	4 bahan pembersih dan 9 peralatan kebersihan	-
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	4 Koran	-	4 koran	4 koran	100	4 koran	-
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pegawai yang tercukupi kebutuhan makanan dan minumannya	70 pegawai	-	70 pegawai	70 pegawai	100	70 pegawai	-
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah rapat dan tamu dinas	100 tamu dinas	-	20 kali	5 kali	25	5 kali	-
9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar	Jumlah undangan rapat koordinasi luar daeah yang dihadiri	150 undangan	-	30 undangan	25 undangan	83,3	25 undangan	-

11	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor yang disediakan	90 unit	-	15 unit	-	-	-	-
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/O perasional	Jumlah kendaraan dinas yang mendapatkan pemeliharaan rutin	3 (Roda 4) dan 5 (Roda 2)	-	3 (Roda 4) dan 5 (Roda 2)	3 (Roda 4) dan 5 (Roda 2)	100	3 (Roda 4) dan 5 (Roda 2)	-
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor yang mendapatkan pemeliharaan	125 komputer printer	-	25 komputer printer	15 komputer printer	60	15 komputer printer	-

- Implikasi yang timbul terhadap capaian Renja sampai dengan triwulan II

Beberapa program dan kegiatan yang belum tercapai target kinerjanya dikarenakan jadwal pelaksanaannya pada triwulan III dan IV. Dan untuk mencapai target pada akhir Tahun 2018 maka akan dilakukan upaya pengoptimalan program dan kegiatan.

- Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
  1. Lebih teliti dalam pelaksanaan perencanaan suatu kegiatan.
  2. Melakukan penyesuaian dalam penganggaran tahun berikutnya dengan acuan serapan pada tahun sebelumnya

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Kebutuhan masyarakat yang semakin hari semakin meningkat maka dibutuhkan sistem kerja yang lebih efektif dan efisien dalam menunjang pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat pengguna layanan publik. hal ini turut didukung pula dengan semakin berkembangnya era keterbukaan masyarakat yang mengakibatkan tuntutan yang lebih banyak kepada birokrasi pemerintah dan aparatnya untuk dapat memberikan pelayanan yang prima. Kepuasan masyarakat yang mengakses layanan publik adalah faktor penentu berhasil tidaknya kinerja setiap organisasi publik di mata masyarakat. Oleh karenanya pemahaman terhadap pihak yang berkepentingan atau pelanggan yang dalam hal ini adalah masyarakat luas sangat diperlukan. Penyelenggaraan pola pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan publik harus disesuaikan. Kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik diakui memang menjadi kebutuhan yang sangat mendasar. Kebijakan pengembangan dan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu di Kota Batu pada hakekatnya merupakan salah satu upaya perbaikan kualitas pelayanan perizinan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat secara berkesinambungan, yang dilaksanakan melalui pembenahan sistem pelayanan perizinan secara menyeluruh, dan terintegrasi dengan strategi maupun kebijakan.

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga

Kerja berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu memiliki fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dan rencana strategis dibidang penanaman modal, pelayanan perijinan, dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
- b. penetapan rencana kerja dan anggaran di bidang penanaman modal, pelayanan perijinan, dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal, pelayanan perijinan, dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
- d. penyelenggaraan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia aparatur di bidang penanaman modal, pelayanan perijinan, dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
- e. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal, pelayanan perijinan, dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja; penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran di bidang penanaman modal, pelayanan perijinan, dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja turut serta mewujudkan misi kedua, misi ketiga dan misi kelima yaitu:

1. Misi kedua: Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Seutuhnya Melalui Aksesibilitas Dan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Pemberdayaan Perempuan. Misi ini bertujuan untuk mewujudkan penguatan kapasitas SDM Kota Batu melalui pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan sosial berbasis pengarusutamaan gender. Sesuai Tugas dan Fungsi DPMPSTP dan Naker mewujudkan tujuan tersebut dengan cara meningkatkan kesempatan dan penempatan tenaga kerja, sehingga dapat berkontribusi dalam penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka yang ada di Kota Batu;
2. Misi ketiga: Mewujudkan Daya Saing Perekonomian Daerah yang Progresif, Mandiri dan Berwawasan Lingkungan Berbasis Pada Potensi Unggulan. Misi ketiga Kota Batu ini bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berkualitas dan

berkeadilan melalui pengembangan agro wisata, kemandirian dan produktivitas desa. Tujuan ini pada DPMPTSP dan Naker diwujudkan dengan meningkatkan realisasi nilai investasi;

3. Misi kelima: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel berorientasi pada pelayanan publik yang profesional. Misi kelima Kota Batu ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang baik dan profesional yang didukung oleh mantapnya sistem kelembagaan dan aparatur yang berkualitas dan berkompeten berdasarkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk bisa berkontribusi dalam pencapaian tujuan tersebut, DPMPTSP dan Naker melaksanakan proses pelayanan perizinan yang mudah, murah, cepat dan tepat.

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kota Batu

No	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi	
		Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	20%	22%	25%	28%	30%	-	20%	20%	22%
2	Jumlah investasi yang terealisasi	410 M	450 M	475 M	495 M	500 M	1915M	1755M	410M	450M
3	Survey kepuasan masyarakat	75	75	75	75	75	75	75	75	75



### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

1. Lahan bagi pengembangan infrastruktur dan usaha industri pariwisata berskala menengah/besar terbatas;
2. Belum adanya regulasi tentang kebijakan penanaman modal, terutama mengenai fasilitas, layanan dan jaminan bagi investor jika melakukan investasi di Kota Batu;
3. Belum adanya peta investasi yang akan menjadi referensi bagi calon investor untuk dapat menanamkan investasinya di Kota Batu;
4. Belum optimalnya dampak penyelenggaraan bursa kerja bagi pencari kerja di Kota Batu sehingga lowongan pekerjaan yang disediakan banyak diisi dari luar kota Batu;
5. Masih perlunya pelatihan ketrampilan / kewirausahaan bagi pencari kerja di Kota Batu sehingga diharapkan ada beberapa alternatif untuk bisa membuka lapangan kerja sendiri sesuai dengan kemampuan atau keahlian yang dimiliki;
6. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan penciptaan lapangan kerja, belum diimbangi dengan rencana umum penanaman modal yang memadai.
7. Belum optimalnya koordinasi dengan Perangkat Daerah lain yang tergabung dalam tim teknis perizinan sehingga terkadang masih terjadi kesalahpahaman informasi kepada pemohon izin ketika di lapang.
8. Perselisihan antara pekerja dan pemberi kerja yang masih terus terjadi

## **BAB IV**

# **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Untuk mendukung pencapaian tujuan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja perlu melaksanakan program dan kegiatan yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu Tahun 2018

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kuantitatif	Lokasi	Sebelum Perubahan (sesuai DPA APBD 2018)	Sesudah Perubahan (Menyelaraskan dengan rumusan Rancangan Renstra PD)	Bertambah/(Berkurang)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Program Pembinaan Lingkungan Sosial</b>	<b>Jumlah lulusan pelatihan yang memiliki sertifikasi keahlian</b>	<b>40 orang</b>					
1	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan	56 orang	Batu	317,412,100	631,396,800	313,984,700	DBHCHT
2	Fasilitasi Promosi bagi usaha mandiri masyarakat	Jumlah usaha mandiri yang difasilitasi promosi	20 usaha	Batu	-	72,430,000	72,430,000	DBHCHT
2	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>	<b>Jumlah LPKS yang memiliki program sesuai SKKNI</b>	<b>9 LPKS</b>					
3	Pembinaan dan Peningkatan Mutu Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Instruktur LPKS yang mendapatkan peningkatan kompetensi	30 instruktur	Batu	44,968,400	44,968,400	-	PAD
3	<b>Program Peningkatan Kesempatan Kerja</b>	<b>Persentase pencari kerja yang telah difasilitasi penempatannya</b>	<b>100%</b>					

4	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Jumlah informasi lowongan pekerjaan yang tersedia	300 lowongan	Batu	116,710,400	116,710,400	-	PAD
5	Penyiapan tenaga kerja siap pakai	Jumlah peserta yang mengikuti acara	250 peserta	Batu	40,223,500	40,223,500	-	PAD
6	Perluasan Tenaga Kerja pada Sektor UMSI	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan manajemen	80 orang	Batu	73,837,500	73,837,500	-	PAD
<b>4</b>	<b>Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</b>	<b>Persentase penyelesaian kasus perselisihan pengusaha pekerja</b>	<b>70%</b>					
7	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi dan mediasi PPHI	75 orang	Batu	44,725,000	44,925,000	200,000	PAD
8	Survei KHL dan Penetapan UMK	Jumlah survei yang dilakukan dalam menentukan nilai KHL, pemantauan UMK, pemberian THR bagi pekerja	12 laporan	Batu	146,702,500	146,702,500	-	PAD
9	Sosialisasi Penetapan UMK	Jumlah pelaku usaha yang memedomani pemberian UMK	100 peserta	Batu	46,974,900	46,974,900	-	PAD
<b>5</b>	<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>	<b>Jumlah Investor di Kota Batu</b>	<b>10 Investor</b>					
10	Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerjasama Strategis Antara Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah	Jumlah peserta yang mengikuti fasilitasi kerjasama usaha	100 pelaku usaha	Batu	76,852,000	76,852,000	-	PAD
11	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah usaha yang dipantau dan diawasi pelaksanaan penanaman modal	108 perusahaan	Batu	122,037,800	170,487,800	48,450,000	PAD

12	Penyelenggaraan Pameran Investasi	Jumlah pameran investasi	1 pameran	Luar Batu	203,048,000	203,048,000	-	PAD
13	Promosi Kerjasama Investasi Event Khusus	Jumlah pameran investasi	1 pameran	Luar Batu	642,405,000	642,405,000	-	PAD
<b>6</b>	<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>	<b>Penambahan realisasi investasasi</b>	<b>50 M</b>					
14	Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Di Bidang Investasi	Jumlah peserta yang mengikuti workshop LKPM online	100 pelaku usaha	Batu	73,860,000	73,860,000	-	PAD
15	Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal Kepada Masyarakat Dunia Usaha	Jumlah peserta yang memahami kebijakan penanaman modal	480 peserta	Batu	190,657,000	190,657,000	-	PAD
<b>7</b>	<b>Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</b>	<b>Persentase pendaftaran perizinan yang terintegrasi dengan system informasi</b>	<b>100%</b>					
16	Penyusunan Database Perijinan	Jumlah bangunan yang diinventarisasi	60.000 bangunan	Batu	623,809,500	623,809,500	-	PAD
<b>8</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Perijinan</b>	<b>Persentase permohonan perizinan yang diterbitkan</b>	<b>80%</b>					
		<b>Jumlah pendaftaran perizinan</b>	<b>4000</b>					
17	Peninjauan dan Evaluasi Kelayakan Perijinan	Jumlah permohonan izin yang ditinjau dan dievaluasi	3500 izin	Batu	233,879,000	344,079,000	110,200,000	PAD
18	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Jumlah SPP dan SOP Perijinan	74 sop	Batu	146,623,000	146,623,000	-	PAD
19	Penyediaan Informasi dan Kelengkapan Pendaftaran Perijinan	Jumlah perlengkapan pelayanan perizinan	11.500 lembar, 13.000 sms	Batu	69,055,000	81,105,000	12,050,000	PAD
20	Uji Publik dan Pembahasan Perubahan Perda IMB	Jumlah Perda yang direvisi	1 perda	Batu	174,814,000	174,814,000	-	PAD

21	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur	Jumlah peserta sosialisasi	100 orang	Batu	-	25,000,000	25,000,000	PAD
9	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase laporan yang dapat diselesaikan tepat waktu	80%					
22	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pelayanan Surat Menyurat yang terlaksana	50 surat	Batu	4,985,000	5,985,000	1,000,000	PAD
23	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah honorarium yang disediakan selama periode 1 tahun	45 honorarium	Batu	602,405,000	681,205,000	78,800,000	PAD
24	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis yang disediakan	43 jenis atk	Batu	34,060,000	38,060,000	4,000,000	PAD
25	Penyediaan Barang Cetak an dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6 jenis	Batu	87,711,500	87,711,500	-	PAD
26	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan dan Bahan Pembersih yang disediakan	4 bahan pembersih dan 9 peralatan kebersihan	Batu	11,709,000	11,709,000	-	PAD
27	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	4 Koran	Batu	10,483,920	10,483,920	-	PAD
28	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pegawai yang tercukupi kebutuhan makanan dan minumannya	70 pegawai	Batu	16,205,000	16,205,000	-	PAD
29	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah rapat dan tamu dinas	20 kali	Batu	9,586,000	9,586,000	-	PAD
30	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar	Jumlah undangan rapat koordinasi luar daeah yang dihadiri	30 undangan	Batu	122,550,000	157,550,000	35,000,000	PAD
10	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana yang layak digunakan</b>	<b>75%</b>					

31	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor yang disediakan	1 CCTV, 4 PC Unit, 1 Laptop, 5 Printer, 4 UPS, 2 Scanner, hardisk eksternal	Batu	105,163,000	119,428,000	14,265,000	PAD
32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/O perasional	Jumlah kendaraan dinas yang mendapatkan pemeliharaan rutin	3 (Roda 4) dan 5 (Roda 2)	Batu	109,045,180	109,045,180	-	PAD
33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor yang mendapatkan pemeliharaan	25 komputer printer	Batu	21,250,000	25,250,000	4,000,000	PAD
11	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai yang telah mengikuti pelatihan	100%					
34	Pendidikan dan Pelatihan Formal Daya Aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan/diklat	8 orang	Batu	30,000,000	30,000,000	-	PAD
35	Peningkatan Profesionalisme SDM Pelayanan Perijinan	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	30 Orang	Batu	50,700,000	50,700,000	-	PAD
<b>JUMLAH</b>					<b>4,604,448,200</b>	<b>5,323,827,900</b>	<b>719,379,700</b>	

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018 telah disusun dalam dokumen RENJA PERUBAHAN PD ini berdasarkan acuan dokumen perencanaan di tingkat vertikal sekaligus mempertimbangkan berbagai hasil analisis terhadap perkembangan terbaru kondisi masyarakat maupun kebutuhan organisasi PD. Pada tahun 2018 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu telah menetapkan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan sebanyak 11 program dan 35 kegiatan. Perubahan Rencana Kerja tahun 2018 ini selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA-P) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu pada tahun 2018 disusun sebagai Pedoman Umum Pengembangan dan Peningkatan Layanan Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Tenaga Kerja. Di dalamnya memuat tentang program-program Pelayanan Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Tenaga Kerja untuk pencapaian tujuan organisasi.

Disadari bahwa perkembangan ilmu pengetahuan teknologi akan berkembang pesat dalam kurun waktu yang cepat, oleh karena itu Rencana Kerja ini buat dengan seksama dan untuk disesuaikan dengan tuntutan dan tantangan kedepan. Demikian Perubahan Rencana Kerja (RENJA-P) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu pada tahun 2018